



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 77.702.878.350,00 (*tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

## **Pasal 2**

Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 29**

**BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>KECAMATAN</b>	<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)</b>
<b>TAPIN UTARA</b>	1	KERAMAT	452,477,241
	2	ANTASARI	560,495,078
	3	JINGAH BABARIS	427,785,311
	4	BANUA HANYAR	448,087,411
	5	BANUA HALAT KIRI	476,537,620
	6	BANUA HALAT KANAN	494,321,274
	7	PERINTIS RAYA	535,362,734
	8	KAKARAN	434,465,687
	9	ANTASARI HILIR	506,563,371
	10	LUMBU RAYA	427,800,346
	11	BANUA HANYAR HULU	423,134,048
	12	BADAUN	410,904,002
<b>BINUANG</b>	15	TUNGKAP	885,640,204
	16	A.YANI PURA	688,100,714
	17	PULAU PINANG	744,263,001
	18	PUALAM SARI	637,571,379
	19	GUNUNG BATU	704,569,653
	20	PULAU PINANG UTARA	782,687,883
	21	PADANG SARI	509,882,763
	22	MEKAR SARI	517,255,601
<b>TAPIN SELATAN</b>	33	TATAKAN	797,790,541
	34	SUATO TATAKAN	735,456,046
	35	SAWANG	637,726,750
	36	LAWAHAN	646,405,025
	37	TIMBAAN	560,277,741
	38	RUMINTIN	780,513,166
	39	CEMPAKA	583,526,058
	40	HARAPAN MASA	618,653,291
	41	TANDUI	603,501,781
	42	HATIWIN	519,907,241

<b>TAPIN TENGAH</b>	43	PANDULANGAN	638,041,235
	44	LABUNG	593,003,697
	45	MANDURIAN	601,265,660
	46	SERAWI	554,936,606
	47	PEMATANG KARANGAN HULU	646,915,648
	48	PEMATANG KARANGAN	680,779,160
	49	PANDAHAN	761,194,209
	50	PEMATANG KARANGAN HILIR	725,026,145
	51	HIYUNG	675,952,251
	52	ANDHIKA	551,388,331
	53	SUKARAMAI	571,177,304
	54	TIRIK	515,239,233
	55	KEPAYANG	628,789,432
	56	BATANG LANTIK	556,767,237
	57	MANDURIAN HILIR	572,065,129
58	SUNGAI BAHALANG	626,339,231	
59	PAPAGAN MAKMUR	438,335,714	
<b>CANDI LARAS SELATAN</b>	60	MARGASARI HULU	552,269,927
	61	CANDI LARAS	768,340,619
	62	BERINGIN A	829,063,839
	63	MARAMPIAU	735,359,365
	64	PABAUNGAN HILIR	643,175,365
	53	PABAUNGAN HULU	662,429,205
	54	SUNGAI RUTAS	727,242,578
	55	BERINGIN B	575,824,889
	56	MARAMPIAU HILIR	571,145,935
	57	SUNGAI RUTAS HULU	689,101,990
	58	BAULIN	653,623,977
	59	PABAUNGAN PANTAI	536,234,819
<b>CANDI LARAS UTARA</b>	60	KELADAN	1,088,856,959
	61	SUNGAI SALAI	693,568,777
	62	PARIOK	934,390,698
	63	MARGASARI HILIR	871,970,768
	64	BATALAS	997,094,232
	65	RAWANA	678,053,718
	66	BUAS-BUAS	856,963,529
	67	TELUK HAUR	740,170,026
	68	SUNGAI PUTING	826,485,913

	69	SAWAJA	795,265,888
	70	SUNGAI SALAI HILIR	697,110,940
	71	BUAS-BUAS HILIR	870,593,878
	72	RAWANA HULU	826,689,922
<b>BAKARANGAN</b>	73	PARIGI KACIL	626,483,417
	74	BAKARANGAN	535,802,618
	75	PARIGI	513,263,528
	76	PAUL	553,895,230
	77	GADUNG	609,719,069
	78	BUNDUNG	514,243,101
	79	TANGKAWANG LAMA	620,764,572
	80	WARINGIN	520,172,836
	81	GADUNG KERAMAT	483,683,037
	82	MASTA	477,075,005
	83	KETAPANG	441,449,446
	84	TANGKAWANG BARU	502,969,066
<b>PIANI</b>	85	PIPITAK JAYA	611,700,988
	86	MIAWA	586,465,670
	87	BATU AMPAR	583,342,330
	88	HARAKIT	656,189,781
	89	BATUNG	851,664,288
	90	BALAWAIAN	738,844,756
	91	BARAMBAN	538,729,661
	92	BUNTI'IN JAYA	569,946,674
<b>BUNGUR</b>	93	KALUMPANG	610,464,686
	94	BANUA PADANG	521,911,551
	95	BUNGUR	580,761,205
	96	BANUA PADANG HILIR	504,727,762
	97	SHABAH	740,477,438
	98	HANGUI	538,414,042
	99	RANTAU BUJUR	609,892,987
	100	PURUT	546,897,113
	101	BUNGUR BARU	528,428,854
	102	TIMBUNG	485,313,890
	103	PARING GULING	494,876,250
	104	LINUH	577,662,914



<b>LOKPAIKAT</b>	105	BINDERANG	662,376,979
	106	PARANDAKAN	480,113,685
	107	LOKPAIKAT	697,441,957
	108	BATARATAT	454,572,723
	109	BITAHAN BARU	435,888,219
	110	PUNCAK HARAPAN	422,441,339
	111	BUDI MULYA	461,669,482
	112	AYUNAN PAPAN	483,059,168
<b>HATUNGUN</b>	113	TARUNGIN	553,915,528
	114	MATANG BATAS	533,129,814
	115	HATUNGUN	600,779,368
	116	BURAKAI	515,067,473
	117	BATU HAPU	646,247,512
	118	KAMBANG KUNING	503,317,395
	119	ASAM RANDAH	578,427,756
	120	BAGAK	705,320,721
<b>SALAM BABARIS</b>	121	SALAM BABARIS	732,894,758
	122	SUATO LAMA	588,929,716
	123	KAMBANG HABANG LAMA	699,037,997
	124	PANTAI CABE	754,653,648
	125	SUATO BARU	541,773,418
	126	KAMBANG HABANG BARU	665,678,992
<b>TOTAL</b>			<b>77,702,878,350</b>

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**